

PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DI KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR

Indigenous Peoples Participation in Forest Resources Conservation in Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar District

Titit Lestari ¹⁾, Agussabti ²⁾, and M. Rusli Alibasyah ³⁾

¹⁾ Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Banda Aceh, Jl. Teuku Umar No. 1, Banda Aceh
^{2&3)} Fakultas Pertanian Unsyiah, Jln. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3 Darussalam Banda Aceh 23111
Email: tari-sakrisyah@yahoo.co.id

Naskah diterima 26 Agustus 2014, disetujui 4 September 2014

Abstract: *This study aimed to determine the level of indigenous peoples participation in the conservation of forest resources in Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar district. The qualitative supported by simple quantitative method was used in the research. The qualitative and multiple regression analysis was used to assess the level of peoples participation. The results showed that the level of local indigenous peoples was relatively low at 53%. This condition was not caused by their carelessness in preserving the forest resources, but due to various factors including age, education, occupation, income, experience (the duration of being a farmer), the intensity of extension, perception, motivation, incentives, and traditional institutions. The intervention that needed to improve the conservation of forest resources is strengthening and revitalizing the function of the existing traditional institutions. The government has to be as facilitator for implementation of conservation activities of forest resources.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan didukung dengan metode kuantitatif sederhana. Untuk menguji tingkat partisipasi menggunakan analisa statistik regresi ganda dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat tergolong rendah sebesar 53 %. Kondisi ini disebabkan bukan karena ketidak- pedulian mereka dalam melestarikan sumberdaya hutan, akan tetapi karena berbagai factor, diantaranya adalah faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman (lamanya menjadi petani), intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi, insentif, lembaga adat. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan konservasi sumberdaya hutan adalah perlu adanya penguatan dan revitalisasi fungsi lembaga adat yang telah ada. Pemerintah perlu menjadi fasilitator bagi terselenggaranya kegiatan konservasi sumberdaya hutan berbasis kearifan tradisional.

Kata kunci : partisipasi, masyarakat adat, konservasi sumberdaya hutan

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang cukup sering menjadi topik pembicaraan dalam dekade terakhir ini adalah semakin meningkatnya keprihatinan masyarakat terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Keprihatinan ini tidak saja bersifat nasional, tetapi telah, mencapai taraf internasional. Hal ini berkaitan erat dengan semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup di berbagai wilayah dunia. Di Indonesia, pengelolaan sumberdaya alam yang terpusat di tangan pemerintah yang dilaksanakan selama ini semakin disadari tidak sesuai dengan nilai-nilai pemanfaatan sumberdaya alam yang berkerakyatan dan berkelanjutan. Kerusakan

sumberdaya alam seperti hutan, pesisir dan laut telah memasuki tingkat kerusakan yang sangat parah.

Kawasan hutan di daerah Aceh Besar dalam beberapa tahun ini terlihat semakin terbuka aksesnya bagi manusia untuk mengolahnya. Semakin besarnya kebutuhan lahan pertanian bagi penduduk setempat menjadi ancaman serius bagi daerah-daerah yang langsung berbatasan dengan hutan, seperti halnya daerah ini yang berbatasan langsung dengan Kawasan Ekosistem Ulu Masen.

Kawasan hutan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari sumber-sumber dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks sosial masyarakat keberadaan kawasan hutan menjadi penting sebagai

pelindung desa dari banjir bandang maupun sebagai sumber air bagi wilayahnya. Dari dua aspek penting ini maka keberadaan kawasan hutan ini menjadi sangat perlu dijaga kelestariannya.

Berdasarkan hal tersebut, peran serta masyarakat sebagai faktor yang sangat berkepentingan terhadap manfaat dari keberadaan hutan sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan ketersediaan air.

Di lain sisi, karena kawasan hutan letaknya berbatasan langsung dengan wilayah permukiman masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan.
- 2) Apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan
- 3) Apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat adat dengan konservasi sumberdaya hutan

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan.
- 3) Untuk mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi dengan konservasi sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung dengan metode kuantitatif sederhana dimana melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan besaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, khususnya di kawasan Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek

penelitian dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2010).

Penelitian dilaksanakan desa-desa yang tergabung dalam lembaga adat FORSAKA (Forum Sayeung Krueng Kaloek), diantaranya adalah Desa Bueng, Desa Data Cut, dan Desa Aweek yang berbatasan langsung dengan hutan di Kecamatan Kota Jantho.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke desa-desa untuk mengetahui kondisi kawasan. Untuk melengkapi data diadakan kunjungan langsung ke berbagai instansi dan *stake holder* yang memiliki data mengenai konsevasi lahan hutan tempat penelitian.

Untuk memudahkan perolehan data, selanjutnya disebarakan kuesioner kepada responden untuk mengetahui partisipasi masyarakat adat terhadap kawasan hutan konservasi. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang diteliti.

Selain observasi dan kuesioner, dilakukan wawancara *mendalam (depth interview)*. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat adat yang dituakan, pemerintah daerah setempat, departemen kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Data yang diperoleh di lapangan dari observasi, kuesioner dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber tadi dengan menyajikan data hasil penelitian melalui tabel tunggal dan tabel silang yang disusun secara sistematis sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan dan tujuan penelitian. Selanjutnya didukung dengan analisa kuantitatif sederhana, yaitu menyusun hasil dari kompilasi data primer yang diperoleh dalam bentuk tabulasi kemudian dianalisa.

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian survai yang bersifat deskriptif korelasional. Variabel terpengaruh (*dependent variable*) penelitian adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat serta monitoring dan evaluasi terhadap pelestarian (konservasi) hutan dan sungai . Sedangkan variabel pengaruhnya (*independent variable*) adalah kelompok variabel faktor individu dan faktor organisasi yang merupakan karakteristik masyarakat. Faktor individu adalah variabel: (1) umur, (2) pendidikan (3) pekerjaan (4)

pendapatan (5) pengalaman (lamanya menjadi petani) (6) intensitas penyuluhan, (7) persepsi, (8) motivasi, (9) insentif, dan (10) lembaga adat

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan diinterpretasikan dengan triangulasi teori, yaitu membandingkan dan memadukan berbagai teori dalam bidang ilmu dan atau lintas ilmu, terutama bidang ilmu lingkungan dan ilmu antropologi. Analisa juga dilakukan analisa kuantitatif menggunakan data statistik sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi untuk mendukung analisa kualitatif yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Gampong yang Berbatasan dengan Hutan

Secara administratif, Gampong Aweek, Data Cut, dan Bueng berada dalam wilayah Kecamatan Kota Jantho. Kabupaten Aceh Besar yang merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan Hutan Cagar Alam Pinus Jantho dan juga Hutan Lindung Jantho. Tipologi gampong ini adalah desa di sekitar hutan dan letaknya tidak jauh dari ibukota Kabupaten Aceh Besar. Ketiga gampong ini secara demografi merupakan desa dengan kepadatan penduduk sangat rendah meskipun letaknya hanya 3-4 km dari pusat ibukota Kabupaten Jantho.

Sebagian besar luas lahan di gampong ini adalah lahan non pertanian. Belum ada data pasti dilapangan mengenai luasan dari hutan desa. Tetapi berdasarkan analisa dan data dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud lahan non pertanian dari data BPS adalah termasuk lahan hutan, sedangkan lahan sawah dan lahan non sawah adalah lahan gampong yang diusahakan penduduk sebagai sawah dan kebun atau ladang.

Lahan desa di sekitar hutan Cagar Alam secara umum lebih banyak dimanfaatkan sebagai ladang/kebun yang ditanami kemiri, sawit, pinang dan coklat. Di desa Bueng, pemanfaatan lahan untuk ladang/kebun mencapai hampir setengah dari luas wilayah gampong, selebihnya digunakan sebagai sawah dan permukiman. Selain itu juga masih banyak terdapat lahan marginal yang berupa padang rumput yang sengaja digunakan sebagai lahan penggembalaan ternak. Penggunaan lahan

marginal untuk penggembalaan ternak banyak dijumpai di daerah ini, bahkan di Gampong Data Cut mencapai lebih dari setengah dari total luas desa digunakan sebagai padang penggembalaan.

Penanaman lahan untuk padi sawah diantara tiga gampong penelitian yang paling banyak adalah gampong Bueng. Gampong Bueng, Data Cut, dan Aweek adalah gampong yang paling dekat letaknya dengan sumber air yang berasal dari Krueng Kalok. Air sungai Kalok selanjutnya dialirkan ke gampong-gampong yang menjadi anggota FORSAKA dengan pipanisasi. Sampai saat ini seluruh anggota FORSAKA telah dapat menikmati air bersih sampai ke rumah-rumah.

Gampong Aweek, Bueng, dan Data Cut yang semula sawahnya hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber airnya, saat ini sudah dapat memanfaatkan aliran air dari Krueng Kalok, sehingga sawah mereka dapat berproduksi 2 kali dalam setahun dengan menggunakan air dari Krueng Kalok. Sedangkan desa lain belum mendapat aliran air dikarenakan topografi yang bergelombang menyulitkan aliran air dari Gampong Bueng ke gampong-gampong lain.

Berdasarkan wawancara dengan responden, diperoleh gambaran bahwa masyarakat yang tinggal di desa ini dahulunya adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Keterbatasan lahan yang bisa ditanami akibat dari sulitnya air, menyebabkan masyarakatnya tidak dapat menggunakan lahan desanya sehingga mereka mencari nafkah di hutan dengan menebang pohon. Saat ini justru kondisinya berubah 180 derajat akibat adanya perubahan pola pikir masyarakat dengan semakin banyaknya manfaat hutan bagi mereka diantaranya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan air sehari-hari yang mereka dapatkan dari sungai yang berhulu di hutan cagar alam pinus Jantho. Masyarakat ketiga desa tersebut saat ini telah mendapatkan sumber air yang cukup akibat adanya proyek pipanisasi yang dilakukan oleh lembaga adat FORSAKA dengan bantuan dari berbagai lembaga donor dan juga pemerintah.

Lembaga Adat dalam Konservasi Sumberdaya Hutan

Pembentukan FORSAKA diawali dengan adanya sekolah lapangan yang di lakukan oleh USAID ESP untuk melihat potensi dan kebutuhan masyarakat gampong di pinggiran

hutan. Bermula dari kegiatan Sekolah Lapangan di Desa Bueng, masyarakat menyadari bahwa sumberdaya alam yang ada, termasuk air sangatlah penting dan keberadaannya harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan anak cucu dimasa mendatang. Konservasi air ini tidaklah mudah dilakukan, karena ternyata bila diamati dapat terlihat bahwa hutan di kawasan sumber air mulai terancam oleh berbagai kegiatan seperti ilegal logging, perambahan hutan serta sistem pertanian lading berpindah yang tidak ramah terhadap kelestarian sumber air. Hasil temuan tersebut menjadi temuan masalah yang harus segera dicari solusinya. Kebutuhan paling mendasar dari masyarakat adalah kebutuhan air bersih. Keberadaan air bersih yang melimpah tetapi masyarakat tidak dapat menikmatinya menjadi isu besar yang akhirnya USAID ESP kerjakan. Pada tanggal 26-27 Juni 2007 dengan difasilitasi oleh USAID ESP (Environmental Services Program), dibentuklah lembaga adat FORSAKA.

Keberadaan lembaga adat FORSAKA sangat membantu masyarakat di ketiga gampong tersebut dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. FORSAKA atau singkatan dari Forum Sayeung Krueng Kaloek yang terdiri seluruh elemen masyarakat di Kemukiman Jantho termasuk lembaga adatnya, saat ini kemukiman Jantho terdiri dari 13 Desa. Lima Desa diantaranya, yaitu Desa Bueng, Jalin, Aweek, Data Cut dan Jantho Lama telah bergabung dalam Forsaka. Desa-desa ini sudah terhubung dengan sistem air bersih yang bersumber dari Sungai Krueng Kaloek melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang didanai oleh World Bank.

Tujuan Forsaka adalah meningkatnya peranan masyarakat gampong-gampong di sekitar Krueng kaloek melalui sebuah wadah yang didukung oleh berbagai pihak untuk melindungi dan menjaga kelestarian sumber air dan keanekaragaman hayati di hutan sekitar Krueng kaloek, menghindari terjadinya erosi di kawasan Krueng Kaloek, menciptakan lapangan kerja demi bagi masyarakat disekitar Krueng Kalok dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, dan membangun kawasan Krueng Kaloek dengan penanaman aneka tanaman perkebunan dan kehutanan.

Program kegiatan yang dilakukan Forsaka adalah menetapkan kawasan sumber air Krueng Kaloek perlindungan (hutan larangan masyarakat), merehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Krueng Kaloek, meningkatkan akses

air bersih dan sanitasi untuk masyarakat desa-desa sekitar Krueng Kaloek dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif, menghidupkan kembali kearifan tradisional melalui Qanun Gampong seperti Qanun Gampong yang telah ada di Gampong Bueng (terlampir).

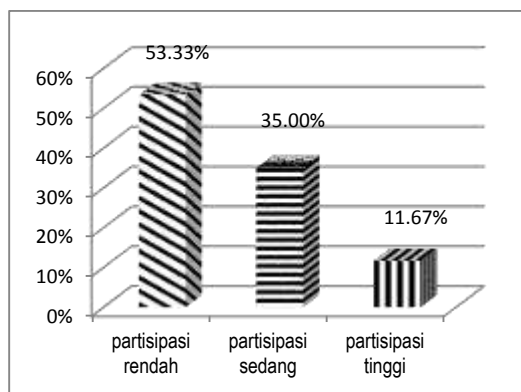
Aturan mengenai pengelolaan hutan dan sungai di wilayah ini KaPeSAK (Kawasan Perlindungan Sumber Air Krueng Kalok) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Forsaka Nomor 01/Forsaka/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Penetapan Kawasan Perlindungan Sumber Air Krueng Kaloek (KaPeSAK) sebagai Kawasan Lindung Kesepakatan Masyarakat. Aturan yang diberlakukan sebagai berikut :

- a. Setiap warga Gampong harus melindungi KaPeSAK, dengan cara mencegah terjadinya perambahan, penebangan kayu, pembakaran lahan dan perusakan lain-lainnya didalam Kawasan tersebut.
- b. Bila ada warga Gampong yang menemukan hal-hal yang dilarang dalam butir tersebut diatas, diharapkan segera melaporkannya kepada perwakilan Forsaka di Gampong.
- c. Pengelolaan Air Bersih menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat serta pengaturannya (tarif, pengelola dan pemakai) memakai ketentuan yang diatur oleh Pengurus Forsaka (Forum Sayeung Krueng Kaloek).
- d. Tarif ditetapkan oleh Geuchik melalui musyawarah Gampong. Besarnya nilai tarif diusulkan oleh Pengelola Air di Gampong dengan menghitung komponen biaya operasi, pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan, pengembangan system dan biaya kontribusi untuk kas gampong dikoordinasikan dengan pengurus FORSAKA.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumberdaya Hutan

Berdasarkan pengolahan data primer diperoleh tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang termasuk dalam kategori partisipasi rendah yang memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 32 responden atau 53 % dari total 60 responden. Rendahnya partisipasi dalam konservasi sumberdaya hutan dan air di daerah ini

dipengaruhi karena kurangnya pemahaman mereka akan pentingnya perencanaan dalam pembangunan suatu kawasan.



Gambar 1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan

Hal lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air adalah karena kesibukan masyarakat adat dalam melakukan aktivitas bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan pendapatan dalam rangka membantu perekonomian keluarga. Bentuk partisipasi dalam konservasi sumberdaya hutan dan air yang dilakukan oleh masyarakat adat di daerah ini tergolong pada partisipasi yang terpaksa yaitu partisipasi yang dilakukan karena kebutuhan mereka akan pendapatan. Motif mereka ikut terlibat adalah untuk mencari penghasilan tambahan.

Hubungan Umur terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Usia adalah rentang kehidupan yang dinyatakan dengan tahun. Responden di lokasi penelitian dapat digolongkan sebagai penduduk usia produktif. Dimana sebagian besar responden mampu melakukan banyak kegiatan dalam hal ini berupa kegiatan konservasi sumberdaya hutan. Yang dimaksud usia produktif dalam penelitian ini adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Jika dilihat dari kriteria Badan Pusat Statistik yang dimaksud usia produktif berada pada kisaran usia 15-64 tahun.

Berdasarkan hasil uji statistik untuk melihat hubungan antara umur dengan tingkat partisipasi diperoleh gambaran bahwa ada hubungan negatif antara umur (X_1) terhadap

partisipasi masyarakat adat (Y_1).Keadaan ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel umur di daerah penelitian mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air. Tingkat korelasinya dalam kategori sedang dan arahnya negatif, maka dapat diartikan semakin muda, seseorang akan semakin ikut berpartisipasi meskipun hanya mengambil bagian kecil untuk ikut dalam konservasi sumberdaya hutan dan air. Bila dilihat kenyataannya, variabel umur mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi dalam konservasi sumberdaya hutan dan air, hal ini berarti bahwa seseorang dikatakan matang atau dewasa untuk melakukan sesuatu aktivitas seperti konservasi sumberdaya hutan tidak hanya diukur oleh umur, melainkan dilihat dari tingkat berfikirnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa umur mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa sebagian besar pengurus lembaga adat yang mengurus masalah konservasi sumberdaya hutan adalah usia menengah hingga muda artinya usia sampai 40-an tahun sedangkan usia diatasnya adalah sebagai penasehat atau tempat rujukan. Pelaksana kegiatan konservasi dan sasaran sosialisasi konservasi adalah golongan muda.

Hubungan Tingkat pendidikan terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang diikuti oleh responden. Pentingnya pendidikan formal bagi responden, agar dapat mengukur pengetahuan dalam memahami aspek konservasi sumberdaya hutan di wilayahnya.

Menurut Nivada (2008) semakin lama menjalani pendidikan formal maka kecenderungannya akan dianggap memiliki wawasan dan pengetahuan yang akan berkorelasi positif terhadap partisipasi dan respon terhadap sesuatu hal. Hikmah (2002) menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendidikan dapat menentukan tinggi rendahnya partisipasi yang ditunjukkan dalam suatu kegiatan, oleh karena itu semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin

tinggi pula cara berpikir dan cara bertindak untuk suatu kegiatan.

Hasil perhitungan statistik menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pendidikan (X_2) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dengan demikian terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat. Dengan interpretasi bahwa tingkat pendidikan seseorang di daerah penelitian mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi. Korelasinya kuat dan arahnya positif maka dapat diartikan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang di daerah penelitian cenderung untuk memberikan partisipasi meskipun tingkat partisipasinya rendah.

Hubungan Pekerjaan terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Hasil perhitungan statistik menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pekerjaan (X_3) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dari hasil analisa data di atas menunjukkan korelasi antara pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat adat 0,102 (r hitung). Dan harga koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,010404. Kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan dengan r tabel dengan taraf signifikansi 5 % untuk menguji taraf signifikasinya. Harga koefisien korelasi pada r tabel dengan taraf signifikansi 5 % dan N = 60 adalah 0,200172 hasil ini menunjukkan bahwa r hitung lebih kecil dari r tabel. Dengan demikian terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara pengaruh pekerjaan terhadap partisipasi masyarakat adat tetapi nilainya sangat kecil, berarti pekerjaan bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat. Artinya bahwa pekerjaan tidak memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat adat terhadap konservasi sumberdaya hutan.

Hubungan Pendapatan terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendapatan responden sebanyak dengan jumlah pendapatan 1.500.000-2.500.000. Rendahnya pendapatan responden dalam penelitian ini karena mereka hanya sebagai petani dan buruh tani dengan lahan

pertanian yang relative kurang subur. Sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan dibawah Upah Minimum Propinsi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di daerah penelitian dikategorikan masyarakat prasejahtera dan keluarga sejahtera I.

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendapatan responden di daerah penelitian ini karena mereka tidak memiliki keterampilan khusus, sehingga untuk memperoleh pendapatan mereka hanya memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pendapatan responden adalah penghasilan rata-rata responden setiap bulan yang diperoleh dari berbagai sumber dan diukur dalam Rp/bulan. Tingkat pendapatan responden yang menjadi objek penelitian meliputi besarnya pendapatan masyarakat dalam membantu perekonomian keluarga. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan dengan lahan yang didominasi lahan penggembalaan adalah petani dan buruh tani dengan sumberdaya yang terbatas, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan modal dengan kondisi seperti ini maka sumber pendapatan utama tergantung pada sumberdaya alam di sekitarnya.

Berdasarkan hasil uji korelasi menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara pendapatan (X_4) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dari hasil analisa data di atas menunjukkan korelasi antara pendapatan terhadap partisipasi masyarakat adat 0,192 (r hitung). Dan harga koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,036864. Kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan dengan r tabel dengan taraf signifikansi 5 % untuk menguji taraf signifikasinya. Harga koefisien korelasi pada r tabel dengan taraf signifikansi 5 % dan N = 60 adalah 0,200172 hasil ini menunjukkan bahwa r hitung lebih kecil dari r tabel. Dengan demikian terdapat terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara pendapatan terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti pendapatan bisa dikatakan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat.

Hubungan Pengalaman terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Pengalaman dalam penelitian ini di ukur dari lamanya mereka menjadi petani. Asumsi yang digunakan adalah semakin lama mereka menjadi petani maka tingkat partisipasinya akan semakin tinggi karena kedekatan mereka dengan alam. Petani di daerah ini mempunyai

ketergantungan yang tinggi terhadap sumber air yang berasal dari hutan. Kondisi ini menyebabkan mereka mempunyai ikatan ketergantungan yang tinggi terhadap hutan sebagai penyedia sumber air.

Dari hasil perhitungan statistik menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara pengalaman (X_5) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dengan demikian terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengaruh pengalaman terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti pengalaman bisa dikatakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat.

Hubungan Intensitas Penyuluhan terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Pertemuan dalam rangka penyuluhan merupakan wahana komunikasi, berbagi pengalaman, serta wahana untuk memecahkan berbagai masalah yang terkait dengan kegiatan konservasi sumberdaya hutan yang dihadapi masyarakat adat.

Penyuluhan adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Pada dasarnya pengembangan masyarakat yang dibangun berdasarkan realitas di yakini akan lebih mampu menjamin pemberdayaan masyarakat, yakni proses untuk membina kemampuan masyarakat untuk mewujudkan hasil kerjanya dalam memperbaiki martabat dan kedudukan sendiri. Hasil perhitungan statistik menyatakan bahwa ada hubungan positif antara intensitas penyuluhan (X_6) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dengan demikian terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh intensitas penyuluhan terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti intensitas penyuluhan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat.

Hubungan Persepsi terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Gibson et.al, 1997 menyatakan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menafsir dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek), tanda-tanda dari sudut pengalaman yang bersangkutan. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian, dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Dia juga menjelaskan

bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu akan memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang berbeda meskipun obyeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting dari pada situasi itu sendiri. Allison dalam Boedjo (1986) mengatakan bahwa persepsi adalah 'lensa konseptual' (conceptual lens) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisa untuk memahami suatu masalah. Akibat dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman dan perumusan atas suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif. Persepsi ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada suatu isu. Persepsi mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Walgito (1990), mendefinisikan persepsi adalah suatu kesan terhadap suatu obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek tersebut yang diterima oleh individu, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.

Menurut persepsi responden, hutan memiliki banyak fungsi (fungsi majemuk), yaitu tempat menyimpan cadangan air dan mencegah banjir/erosi (fungsi ekologi), tempat mencari penghasilan (fungsi ekonomi), dan fungsi lainnya. Disamping itu mereka juga berpandangan bahwa hutan adalah sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kesejahteraan bagi mereka serta patut untuk dilestarikan. Persepsi masyarakat tersebut dibuktikan dengan jawaban responden, pada dimana 60 % mempersepsikan bahwa hutan memiliki fungsi majemuk dan hanya 6% responden yang menjawab bahwa hutan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh persepsi terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti persepsi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat adat yang sangat tinggi terhadap hutan, yang artinya bahwa mereka percaya bahwa hutan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan mereka. Mereka telah memperoleh manfaat dari jasa lingkungan yang ada tetapi partisipasi mereka dalam konservasi sumberdaya hutan sangat kecil. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan

diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya masyarakat mau terlibat dalam kegiatan konservasi sumberdaya hutan. Keterlibatan mereka tidak dalam bentuk dana akan tetapi lebih banyak dalam bentuk tenaga. Mereka sering dilibatkan dalam kegiatan penanaman pohon di pinggir sungai atau di dalam hutan. Mereka memang tidak terlibat penuh dalam tahap persiapan, mereka tidak pernah ikut rapat karena segala kebijakan konservasi diatur oleh lembaga adat FORSAKA berkerjasama dengan pihak terkait. Jadi yang ikut kegiatan perumusan program adalah pengurus FORSAKA. Partisipasi masyarakat adat terlihat jelas pada monitoring *illegal logging*. Sebagai salah satu contoh, mereka akan melaporkan ke pihak berwenang jika ada tindakan yang mengarah pada *illegal logging*. Seharusnya asumsi yang berlaku adalah jika persepsi masyarakat tinggi maka dia akan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan dimaksud. Kegiatan konservasi yang terjadi di daerah penelitian saat ini sudah dalam taraf pemeliharaan hutan dan sungai agar tidak terdeforestasi lagi.

Hubungan Motivasi terhadap Partisipasi Masyarakat adat

Motivasi adalah faktor pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan tertentu (faktor pendorong perilaku seseorang). Motivasi dapat juga diartikan sebagai faktor pendorong yang berasal dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara bertindak seseorang. Dalam penelitian ini sebagian besar responden mempunyai motivasi yang tinggi dalam konservasi sumberdaya hutan dan air. Hasil perhitungan statistik menyatakan terdapat hubungan positif antara motivasi (X8) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dengan demikian terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh motivasi terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti motivasi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat.

Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa ada hubungan yang positif antara motivasi dengan partisipasi. Sedangkan berdasarkan tabel frekwensi juga menunjukkan bahwa motivasi masyarakat adat terhadap konservasi sumberdaya hutan sangat tinggi, hal ini berarti bahwa masyarakat mempunyai kemauan dan tekad yang tinggi dalam konservasi sumberdaya hutan. Kemauan dan semangat yang tinggi

tersebut ternyata tidak diimbangi dengan aksi dalam bentuk partisipasi dalam konservasi sumberdaya hutan, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat adat yang tergolong rendah. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat adat di daerah tersebut masih rendah tingkat partisipasinya, diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih berada di bawah Upah Minimum Propinsi menyebabkan mereka masih lebih mementingkan penggunaan waktunya untuk mencari nafkah daripada digunakan untuk ikut partisipasi dalam kegiatan konservasi. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan mereka sebagai masyarakat “pendengar” dan “pelaksana”, artinya bahwa mereka tidak terlibat aktif dalam penyusunan kegiatan konservasi sumberdaya hutan, akan tetapi mereka hanya siap menerima hasil perumusan program dan mereka ikut melaksanakan program, itupun dengan syarat tidak mengganggu waktu mereka dalam mencari nafkah. Jika waktu mencari nafkah terganggu oleh kegiatan konservasi sumberdaya hutan maka mereka menuntut adanya kompensasi berupa insentif sebagai pengganti waktu mencari nafkah mereka yang hilang.

Keberadaan lembaga adat di daerah penelitian yang sangat aktif dalam usaha konservasi tersebut telah banyak membantu masyarakat untuk tidak terlibat penuh dalam penyusunan program konservasi karena pengurus lembaga adat tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik dan selalu aktif dengan pihak terkait guna konsultasi untuk kegiatan konservasi tersebut. Masyarakat dalam hal ini cukup diwakili oleh pengurus lembaga adat yang juga merupakan perwakilan dari beberapa gampong yang menjadi anggota lembaga adat tersebut. Latar belakang sosial ekonomi masyarakat adat merupakan faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam konservasi sumberdaya hutan.

Hubungan Pemberian Insentif terhadap Partisipasi Masyarakat Adat

Ada tidaknya pemberian insentif terhadap pekerja akan memberi pengaruh positif pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini berarti bahwa insentif dapat memberikan stimulan kepada masyarakat agar mau bekerja lebih untuk menjalankan suatu program.

Berdasarkan pembacaan table di bawah menunjukkan bahwa, masyarakat masih beranggapan bahwa insentif itu penting bagi mereka agar mereka mau berpartisipasi. Mereka masih mengharapkan insentif ada dalam setiap kegiatan konservasi sumberdaya hutan.

Insentif dalam penelitian ini merupakan upah yang di terima oleh responden terhadap keterlibatannya dalam konservasi. Insentif adalah kompensasi yang diterima seseorang dalam bentuk upah karena produktivitas kerjanya. Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan penghargaan dan dorongan kepada pekerja. Insentif menjamin bahwa pekerja akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan pekerjaannya. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja individu maupun kelompok.

Hubungan Lembaga Adat terhadap Partisipasi Masyarakat adat

Lembaga adat yang ada di daerah ini berperan penting dalam kegiatan konservasi sumberdaya hutan yang ada. Tetapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat justru tidak mengetahui lembaga adat yang ada karena mereka beranggapan bahwa lembaga adat yang ada adalah lembaga adat yang bersifat tradisional seperti halnya panglima uteun atau keujruen blang. Jika yang dimaksud lembaga adat adalah panglima uteun, lembaga ini memang tidak pernah berperan aktif dalam kegiatan konservasi, karena lembaga adat yang ada adalah lembaga adat yang sudah berbadan hukum yang mereka sebut dengan FORSAKA. Keberadaan lembaga adat tradisional semisal panglima uteun adalah lembaga adat yang tidak berbadan hukum, sehingga lembaga ini tidak mempunyai legitimasi yang kuat dalam konservasi sumberdaya hutan.

Berdasarkan perhitungan statistik dinyatakan bahwa ada hubungan positif antara lembaga adat (X10) terhadap partisipasi masyarakat adat (Y1). Dengan demikian terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengaruh lembaga adat terhadap partisipasi masyarakat adat, berarti lembaga adat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adat dan menunjukkan korelasi yang kuat.

Hubungan Tingkat Konservasi Masyarakat Adat dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Adat

Tingkat korelasi antara kedua variable berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat berpengaruh terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasinya maka semakin tinggi pula kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat dalam hal pengolahan lahan mauun usaha konservasi sumberdaya hutan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat adalah rendah, hal ini juga dikuti dengan kegiatan atau perilaku masyarakat adat yang masih rendah dalam hal konservasi sumberdaya lahan pertanian mereka. Kegiatan konservasi masyarakat adat yang mereka lakukan hanya pada tahap yang masih sederhana, misalnya mereka mengolah tanah minimum, jarang menggunakan pupuk, dan mengolah tanah hanya dengan cara tradisional yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya.

Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat Adat

Adapun beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan dan sungai adalah : (a) Kurangnya waktu yang dimiliki oleh masyarakat dapat memicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak menggunakan waktunya di sawah dan ladang untuk bertani, guna memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang cukup banyak. Sehingga masyarakat lebih cenderung memakai waktu untuk pekerjaan mereka sehari-hari ketimbang ikut ambil bagian dalam konservasi sumberdaya hutan dan air, baik oleh inisiatif sendiri maupun atas dorongan pemerintah, (b) Kurang optimalnya peranan lembaga adat yang justru lebih mempunyai kewibawaan. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan konservasi sumberdaya hutan dan air itu sendiri. Dimana sebagian besar masyarakat belum memahami arti penting hutan dan sungai dan bagaimana cara yang benar dalam kegiatan pelestariannya. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya lembaga yang menangani

dan memberikan penyuluhan mengenai hutan dan sungai.

Usulan Pengelolaan

Pada beberapa kawasan hutan lindung, interaksi antar masyarakat lokal dengan sumberdaya alam masih sangat kuat. Bahkan di beberapa lokasi, pola interaksi yang terjalin memberikan kecenderungan positif terhadap kelestarian hutan MacKinnon, et al. (1990). Upaya untuk berpartisipasi senantiasa diinginkan oleh masyarakat, namun demikian hingga saat ini peran partisipasi belum sepenuhnya optimal. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan baik dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada masyarakat secara individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan publik termasuk di dalamnya kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan (Cohan and Sharp, 1995 dalam Poteete and Ostrom, 2004).

Mengacu kepada hasil analisa sebelumnya terlihat bahwa perilaku aktivitas masyarakat adat di daerah penelitian telah menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Sehingga apabila dilihat kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut maka ada kekhawatiran munculnya ketidakperdulian mereka terhadap konservasi hutan dan air. Sebagian besar masyarakat yang berada pada kondisi keluarga prasejahtera dan sejahtera I, merupakan indikator perlu adanya upaya yang nyata guna menciptakan peluang ekonomi masyarakat adat sebagai penyangga agar mereka tidak mengekspansi wilayah hutan dan sumber air sebagai wilayah pengembangan usaha mereka.

Potensi lahan di daerah penelitian sangat besar, akan tetapi pemanfaatannya hanya sebagai padang gembalaan. Melihat kondisi ini maka perlu ada upaya pemerintah guna menciptakan peluang ekonomi baru dalam pemanfaatan lahan penggembalaan tersebut.

Sedangkan usulan pengelolaan kawasan lindung dan sungai pada prinsipnya terfokus pada upaya untuk menyelaraskan aktivitas budidaya yang berkembang agar tidak mengganggu keberlangsungan fungsi hutan lindung sebagai daerah resapan air dan sungai sebagai sumber air bagi kebutuhan warga. Titik awal pengelolaan diawali dari aspek kelembagaan, yaitu upaya untuk meningkatkan

peran dan kerja sama yang sinambung antar pelaku pembangunan terkait (stake holder) sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Masyarakat Aceh mempunyai tatanan organisasi tradisional yang sebenarnya hingga saat ini masih ada. Akan tetapi keberadaannya semakin termarginalkan dengan munculnya organisasi-organisasi baru bentukan proyek yang dilakukan pemerintah. Sebagai pengelola hutan terdapat pawing uteun, dan pengelola ladang ada petua seunebok, serta pengelola air ada keujruen blang. Lembaga-lembaga tersebut secara kultural mempunyai ikatan yang lebih kuat dibanding organisasi-oraganisasi baru yang muncul akibat program pembangunan. Lembaga tradisional tersebut saat ini sudah mulai mempunyai kekuatan hukum karena mereka telah masuk dalam qanun pemerintah Aceh, akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih belum kuat karena belum ada juknis yang jelas tentang bagaimana pelaksanaannya di level mukim dan gampong. Kondisi ini menyebabkan keberadaan lembaga tradisional tersebut kurang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sebaiknya pemerintah dalam melakukan pembangunan harus melibatkan langsung lembaga adat yang ada sehingga tidak ada dualisme peran dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan dan air. Peran pemerintah (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) adalah menjalankan aturan hukum atau kanun di bidang lembaga adat dan kehutanan secara tegas (law enforcement).

Langkah selanjutnya, memastikan faktor penting lainnya adalah pengawasan. Semua yang berkaitan dengan aturan, dan pelaksanaan yang amanah, tidak mungkin dapat dicapai dengan baik jika tidak ada tindakan pengawasan yang sistematis, terukur, dan terus menerus. Tindakan pengawasan mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi dijadikan rujukan utama untuk melakukan penyempurnaan aturan-aturan / kebijakan dan perbaikan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air yang dilakukan di wilayah tersebut adalah dengan melihat kondisi existing masyarakat adat di wilayah tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air. Kondisi existing masyarakat adat di wilayah tersebut meliputi rendahnya pendidikan dan

rendahnya tingkat pendapatan. Kondisi tersebut diperbaiki melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat adat dan memberikan pelatihan serta penyuluhan. Untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat adat maka diperlukan penguatan lembaga tradisional/lokal secara mengakar dan akuntabel. Lembaga ini diharapkan akan dapat memberikan kemampuan pembelajaran bagi masyarakat adat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan nantinya harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya peningkatan kapasitas masyarakat adat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat, baik dibidang konservasi sumberdaya hutan dan air, pengelolaan usaha kecil menengah (UKM), dan manajemen kepemimpinan. Meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan pembangunan wilayah hutan dan sungai dimulai dari menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini akan membangkitkan kesadaran dan memotivasi diri mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pembangunan wilayah hutan dan sungai dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan sungai secara lestari atau berkelanjutan.

Untuk pengembangan usaha maka dapat dilakukan pelatihan pengolahan produksi hasil pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna dan peningkatan kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat adat dalam mengolah hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan ini dapat menghasilkan produk unggulan pertanian. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah ibukota Kabupaten, maka daerah ini mempunyai peluang besar dalam hal penciptaan peluang ekonomi berbasis pertanian.

Dari upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat adat. Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan hubungan sinergi antar stakeholders dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan dan air secara berkelanjutan. Strategi partisipatif masyarakat adat dapat dilakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pemanfaatan. Perencanaan secara partisipatif, haruslah terbuka dalam merencanakan kegiatan dan masyarakat adat nantinya mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumberdaya.

SIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat adat terhadap konservasi sumberdaya hutan dan sungai di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar adalah rendah. Faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman, intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi, dan insentif, dan lembaga adat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya hutan dan sungai di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Tingkat partisipasi masyarakat adat berhubungan dengan konservasi yang dilakukan, artinya bahwa makin tinggi tingkat partisipasi maka makin tinggi pula kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat dalam hal pengolahan lahan maupun usaha konservasi sumberdaya hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, M.J. 1989. Management of Common Property Resources. In Economic Anthropology. Stuart Plattner, ed. Stanford University Press, Palo Alto.
- Boedjojo. 1986. Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Gibson, J.L., J.M., Ivancecivh, J.H Donnelly. 1997 (alih bahasa Adiarni, Nunuk). Organisasi: perilaku, struktur, proses, jilid 2. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Hikmah. 2002. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan rumput laut di zona pemanfaatan Taman Nasional Ujung Kulon, Tesis, Program Pasca Sarjana, Intitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Inayah. 2011. Kajian peranan lembaga adat (kearifan lokal) Forsaka dalam upaya pelaksanaan program konservasi sumberdaya hutan di Kabupaten Aceh Besar. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- MacKinnon, JK, G. Child, J. Thorsell. 1990. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Moleong, J.L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nivada, A. 2008. Partisipasi masyarakat terhadap restorasi mangrove di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Poteete, A. E. O. 2004. Heterogeneity, Group Size dan Collective Action : The Role of Institutions in Forest Management, Ford Foundation and National Science.
- Taqwaddin. 2009. Gampong sebagai basis perdamaian. Makalah Lokakarya Perumusan Metode Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, Banda Aceh.
- _____. 2010. Penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (mukim) di Provinsi Aceh. Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Walgito, B. 1990. Psikologi Sosial Edisi Revisi. Yayasan Penerbitan Fakultas UGM, Yogyakarta.
- Zahrah, M. 2014. Analisis Kesesuaian Habitat untuk Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dengan Mengembangkan Indeks Habitat, Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Sumatera Utara, Medan.